LAPORAN KINERJA (LKj)

KAPANEWON PIYUNGAN

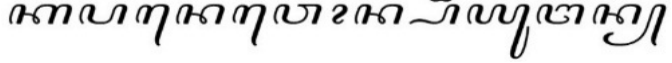

TAHUN 2020

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Raya Yogya-Wonosari Km. 14
Kode Pos 55792, Telp 4353002, Fax 4353393
Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id
Website http://www.kec.piyungan.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah rencana strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah membuahkan hasil, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja di masa yang akan datang menjadi

lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2021

Panewu,

ROY ROBERT EDISON BONAI, A.P., M.M.
NIP. 197302231993011002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan laporan kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daeah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Piyungan telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 107 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan

tata kerja Kapanewon Piyungan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE-KABUPATEN BANTUL**.

Tugas Kapanewon Piyungan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan koordinasi, pemantauan serta evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;

m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **80.57 %.** Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase kalurahan dengan penyelesaian APBKal tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBKal dengan RPJMDes

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Piyungan yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting untuk digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan tercapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iv

Daftar Isi vii

Daftar Tabel viii

Daftar Gambar ix

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Pembentukan OPD 3

C. Susunan Organisasi 5

D. Keragaman SDM 6

E. Isu Strategis 9

Bab II Perencanaan Kinerja 14

A. Rencana Strategis 14

1. Visi dan Misi 14

2. Tujuan dan Sasaran 15

3. Kebijakan, Strategi dan Program 17

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 20

C. Program untuk Pencapaian Sasaran 24

Bab III Akuntabilitas Kinerja 25

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 26

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 27

1. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat ... 27

2. Sasaran Peningkatan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah 29
C. Akuntabilitas Anggaran 41
D. Efisiensi Sumber Daya 43
Bab IV Penutup 45

Daftar Tabel

Tabel I.1 Luas wilayah kalurahan dalam Kapanewon Piyungan 2

Tabel I.2 Jumlah penduduk di Kapanewon Piyungan 3

Tabel I.3 Daftar nominatif ASN Kapanewon Piyungan tahun 2020.....7

Tabel I.4 Jenis kelamin pegawai Kapanewon Piyungan 8

Tabel I.5 Pegawai yang menduduki jabatan struktural menurut eselon 9

Tabel I.6 Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan 9

Tabel I.7 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Piyungan.....10

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..... …..16

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Piyungan 2016 - 2021..... .18

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 19

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020..... 21

Tabel II.5 Program untuk pencapaian Sasaran Tahun 2020..... 24

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 26

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 26

Tabel III.3 Rencana dan realisasi capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat ..... ….27

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah ..... ….30

Tabel III.5 Perbandingan Program/Kegiatan tahun 2019 dan tahun 2020 ..... ….37

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020..... ….41

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 43

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020..... 44

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Kapanewon Piyungan 1
Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon Piyungan 6
Gambar 3 Pelayanan Kapanewon Piyungan 29
Gambar 4 Pendampingan/Sosialisasi dan Koordinasi dengan Kalurahan 32
Gambar 5 Musrenbang Kecamatan Piyungan tahun 2020 33

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Secara administratif Kapanewon Piyungan berada di kawasan wilayah timur laut dan merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT RW) Kabupaten Bantul, Piyungan termasuk kawasan budi daya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Piyungan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah timur dan utara yang dilalui jalan nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Dengan demikian pembangunan di wilayah Piyungan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Peta Kapanewon Piyungan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Peta Kapanewon Piyungan

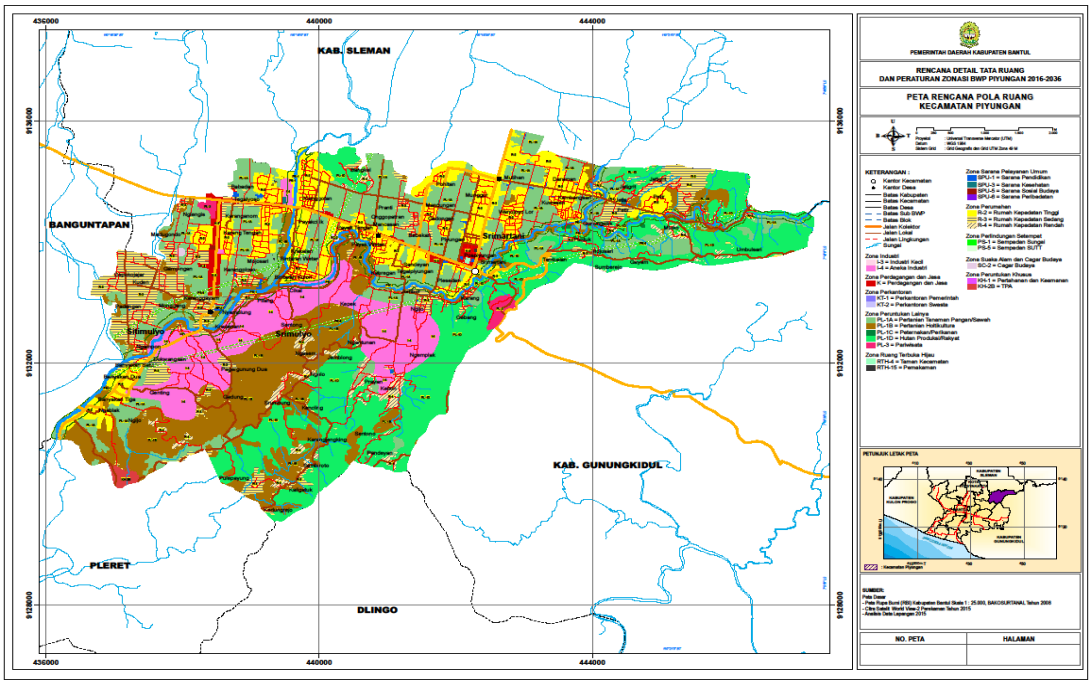

1. Geografis

Kapanewon Piyungan berada di arah sebelah timur laut dari Ibu Kota Kabupaten Bantul. Kapanewon Piyungan mempunyai luas wilayah 3.254,86 Ha merupakan wilayah terluas kelima di Kabupaten Bantul dan secara administratif memiliki 3 kalurahan yaitu Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Srimulyo dan Kalurahan Srimartani dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.
Luas wilayah kalurahan dalam Kapanewon Piyungan

No	Kalurahan	Luas (km^2)	% terhadap luas	Jumlah	
			kapanewon	pedukuhan	RT
1.	Sitimulyo	940	28.89	21	111
2.	Srimulyo	1.456	44.74	22	119
3.	Srimartani	858	26.37	17	112
	Jumlah	3.254	100	60	342

Sumber: Kecamatan Piyungan dalam angka, 2020

Secara geografis, wilayah Kapanewon Piyungan berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Prambanan dan Berbah Kabupaten Sleman
- sebelah selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
- sebelah timur : Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

2. Topografis

Kapanewon Piyungan berada di dataran rendah. Ibu kota kapanewon berada pada ketinggian 80 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kapanewon ke pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Bantul adalah 25 km. Kapanewon Piyungan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis lainnya dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Piyungan adalah 32ºC. Sedangkan suhu terendah 23ºC.

Bentangan wilayah di Kapanewon Piyungan sebesar 41% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 59% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Wilayah Kapanewon Piyungan dilewati oleh satu sungai utama, yaitu Sungai Opak. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal irigasi sawah mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

3. Demografi

Berdasarkan data per Desember 2020 Kapanewon Piyungan dihuni oleh 20.156 Kepala Keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Piyungan adalah 56.272 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 27.740 orang dan penduduk perempuan sebanyak 28.532 orang. Sebagian besar penduduk Kapanewon Piyungan adalah petani. Pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk tertinggi di Kapanewon Piyungan adalah Kalurahan Sitimulyo, yaitu 20.275 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kalurahan Srimartani sebanyak 17.810 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di 3 (tiga) kalurahan di wilayah Kapanewon Piyungan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Piyungan menurut data laporan bulanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2.
Jumlah penduduk di Kapanewon Piyungan

No.	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sitimulyo	10.092	10.183	20.275
2	Srimulyo	8.803	9.384	18.187
3	Srimartani	8.845	8.965	17.810
	Jumlah	27.740	28.532	56.272

Sumber: Monografi Semester 2 tahun 2020 Kapanewon Piyungan

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan perangkat daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.** Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE-KABUPATEN BANTUL.**

Kapanewon Piyungan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Dalam melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;

j. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;

l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;

m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;

o. Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;

p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;

q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

a. Sekretariat;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Program dan Keuangan

b. Jawatan Praja;

c. Jawatan Keamanan;

d. Jawatan Pelayanan Umum;

e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi bagi suatu instansi/organisasi berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi pada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Piyungan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Kapanewon

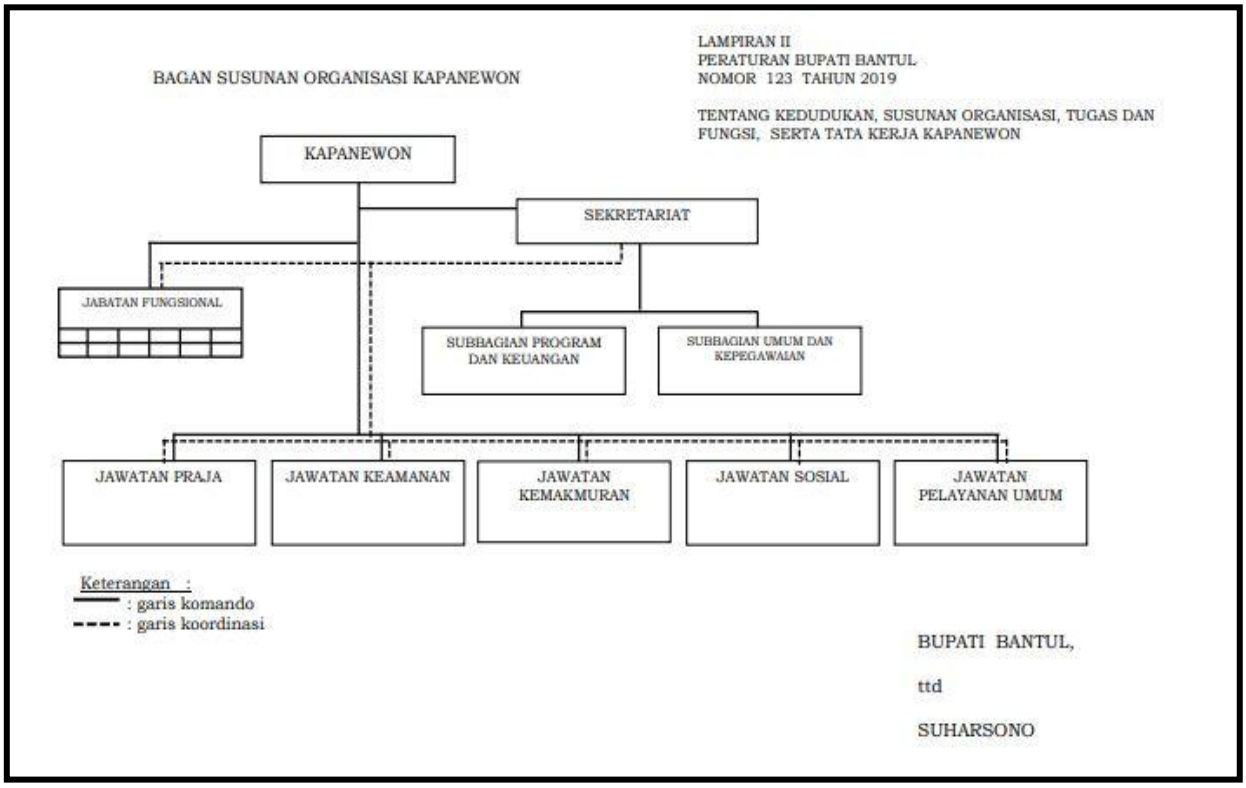

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

a. Sekretariat;

b. Jawatan Praja;

c. Jawatan Keamanan;

d. Jawatan Pelayanan Umum;

e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada panewu anom. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Piyungan sebanyak 18 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.3. Daftar Nominatif ASN Kapanewon Piyungan Tahun 2020

NO.	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	GOL.
1.	Roy Robert E.B., AP., MM	197302231993011002	Panewu	IV / a
2.	Eko Purwanto, S.I.P.	196906141989031005	Panewu Anom	III / d
3.	Muji Rahayu, S.H.M.H.	196607181994032004	Ka. Jawatan Kemakmuran	IV / a
4.	Ratna Tri Suswati, S.Sos.	196508291993012002	Ka. Jawatan Pelayanan Umum	III / d
5.	Sumarsono, S.E.	196911271992031004	Ka. Jawatan Sosial	III / d
6.	Tutik Nurhayati, S.Sos.	196212191986032007	Ka. Jawatan Praja	

7	Jumbadi, SIP	196802111987031002	Ka. Jawatan Keamanan	III / c
8.	Soni Rahmat Setiadi, S.E.	196510051987031013	Ka. Sub Bag. Umum & Kepegawaian	III / d
9.	Ari Suwanti, S.H.	197803301997032001	Ka. Sub Bag. Program dan Keuangan	III/d
10.	Ida Kameswari, S.H.	197612022006042005	Analis Program Pembangunan	III / d
11.	Yudhy Fajrian, S.E.	198406262009031005	Analis Pemerintahan	III / c
12.	Mujiyem	196310231987092001	Pengadministrasi Umum	III / b
13.	Setyadi	196401311986031012	Pengadministrasi Umum	III / b
14.	Sri Umi Maryati	196801131992032004	Pengadministrasi Keuangan	III / a
15.	Santoso	196404171985031008	Pengadministrasi Umum	II / d
16.	Sri Rahayu, S.E.	196610252007012018	Pengadministrasi Umum	II / d
17.	Pardi	19681052006041005	Bendahara	II / d
18.	Suratno Panggung Sambudi	197212282007011006	Pramu Bhakti	II / b

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan, 2020

Tabel I.4.

Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	Panewu Anom	1	-	1
	Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2	3
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	2	4
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	2		2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran		2	2
7	Jawatan Sosial	2		2
Jumlah		**10**	**8**	**18**

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan, 2020

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Strukural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	**9**

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan, 2020

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 18 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.6.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	10
3	D – 3	-
4	SLTA/Sederajat	5
5	SLTP/Sederajat	1
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	**18**

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan, 2020

Dengan dukungan 18 orang di Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, Sarjana: 10 (sepuluh) orang, SLTA sebanyak 5 (lima) orang, dan SMP; 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Kapanewon Piyungan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Piyungan

No.	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan belum optimal	Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana masih kurang - Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
		Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima yang dilakukan oleh ASN	- Kesenjangan antara layanan yang diterima masyarakat dengan harapan masyarakat tentang pelayanan
		Optimalisasi dan peningkatan fungsi kapanewon	- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi program kegiatan OPD di wilayah
.	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan antara kapanewon	Belum optimalnya kesesuaian APBKal dengan RPJMDes	- Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur SDM

	dengan kalurahan dan dinas instansi		perangkat kalurahan
		Presentase kalurahan dengan penyelesaian APBKal tepat waktu	- Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur SDM perangkat kalurahan
		Presentase realisasi program prioritas hasil musrenbang kecamatan	- Masyarakat dalam mengajukan usulan belum berdasarkan skala kebutuhan prioritas - Masih minimnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan
	Pelaksanaan otonomi kalurahan belum maksimal	Pengelolaan ADD dan DD belum optimal	Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keuangan kalurahan
.	Teknologi Informatika	Penguasaaan terhadap laju perkembangan teknologi informatika	Kurangnya diklat teknologi informasi

Secara geografis wilayah Kapanewon Piyungan terdiri atas lahan dan perbukitan yang kurang dimanfaatkan. Masing-masing kalurahan di Kapanewon Piyungan memiliki potensi yang berbeda, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan ke depan adalah :

- Kalurahan Sitimulyo memiliki wilayah yang merupakan perbukitan. Ada beberapa kawasan industri yang telah lebih dahulu berdiri dibanding kawasan industri di Kalurahan Srimulyo. Selain kawasan industri, Kalurahan Sitimulyo juga merupakan kawasan pertanian.
- Kalurahan Srimulyo juga memiliki kawasan perbukitan yang kurang subur karena pengairan yang kurang memadai. Oleh karena itu tanah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan untuk disewakan sebagai kawasan industri di wliayah Kapanewon Piyungan. Akan tetapi kawasan industri di Kalurahan Srimulyo belum begitu berkembang. Banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai tahun 2020 hanya ada 1 pabrik yang beroperasi di kawasan industri Kalurahan Srimulyo.
- Wilayah Kalurahan Srimartani juga merupakan daerah perbukitan yang sebagian besar ditinggali penduduk. Potensi terbesar yang dapat dikembangkan di Kalurahan Srimartani adalah potensi pertanian.
- Kapanewon Piyungan dilalui oleh 2 sungai besar yakni sungai opak dan sungai kali gawe. Apabila musim penghujan tiba, sekitar aliran sungai sering terjadi banjir. Sedang untuk daerah perbukitan sering terjadi tanah longsor jika hujan tiba.
- Wilayah Kapanewon Piyungan yang berada diperbukitan berpotensi terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih ketika musim kemarau tiba. Untuk itu perlu dibangun berbagai fasilitas untuk pemenuhan sarana air bersih baik pipanisasi air bersih maupun pembuatan sumur-sumur bor yang bersumber dari air dalam.
- Tumbuhnya beberapa destinasi wisata baru sebagai wisata alternatif di Kapanewon Piyungan dan perlu dikembangkan secara maksimal. Perlu kerja sama dari berbagai unsur baik masyarakat maupun pemerintah dalam penyediaan fasilitasi wisata serta promosi destinasi wisata.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Dengan beralihnya pengelola dari Kartamantul beralih ke Balai Sampah DIY tidak membawa dampak yang lebih baik. Balai Sampah DIY belum

memberi solusi yang maksimal terhadap kekurangan lahan serta daya tampung yang melebihi kapasitas.

- Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan (pelanggaran perda RT RW) pada zona merah berakibat pada tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona merah.

Dari gambaran di atas, maka isu-isu strategis yang perlu di kembangkan adalah:

1. Fasilitasi dan optimalisasi destinasi wisata di Kapanewon Piyungan termasuk pembangunan infrastruktur menuju lokasi wisata.
2. Perlunya dibangun dan dikembangkan infrastruktur jalan menuju daerah kawasan Industri Piyungan di Kalurahan Srimulyo.
3. Opimalisasi dalam pencegahan dan kewaspadaan terhadap bencana alam, baik banjir, tanah longsor maupun kekeringan. Perlu koordinasi dan kerja sama yang intens dari berbagai pihak.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Piyungan mendukung misi bupati yang ke-1 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kapanewon Piyungan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"**			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	- Presentase kalurahan dengan penyelesaian APBKal tepat waktu - Rata-rata persentase kesesuaian APBKal dengan RPJMDes - Presentase realisasi

Visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
			program prioritas musrenbang kecamatan

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Kec Piyungan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut Kapanewon Piyungan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna) sebagai berikut :

.

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Piyungan 2016 – 2021

Visi : **"**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan publik berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Kec. Piyungan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan di atas, maka perlu dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Piyungan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kapanewon
5. Program peningkatan pelayanan masyarakat
6. Program pembinaan pemerintahan umum kapanewon
7. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kapanewon

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Piyungan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan)
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Presentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Presentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber :Perubahan Renstra 2016-2021 Kec. Piyungan

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Piyungan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD Kapanewon Piyungan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Saroyo Heriyanto
Jabatan : Camat Piyungan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 08 Januari 2020

Pihak Kedua, Bupati Bantul	Pihak Pertama, Camat Piyungan
Drs. H. Suharsono	Drs. Saroyo Heriyanto
	NIP. 196202171992031011

Lampiran Perjanjian Kinerja OPD

Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Piyungan

Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	IKM Kecamatan	Angka	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 90
2	Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencananan Pembangunan Wilayah	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0 0 100
		Rata Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90 0 0 0
		Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 0 0 0

No.	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 320.575.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 148.525.000,-
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 6.445.000,-
4.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 12.020.000,-
5.	Pembinaan Pemerintahan Umum	Rp. 208.630.000,-

6	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Rp. 142.389.000,-
7,	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp. 57.689.000,-
	J u m l a h	Rp. 896.273.000,-

Bantul, 06 Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Bupati Bantul	Camat Piyungan
Drs. H. Suharsono	Drs. Sabyo Heriyanto
	NIP 196202171992031011

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Piyungan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1 Program
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	4 Program

Sumber : Rencana Strategis 2016-2021 Kec. Piyungan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 diolah

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kecamatan	90	93.67	104.07
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	18.2	18.2
Rata-rata				80.57

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Piyungan Tahun 2020, IKU dengan indikator sangat tinggi pada IKU IKM Kaecamatan, IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu, dan IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes sedangkan capaian IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sangat rendah, sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Tinggi,** dengan rata-rata capaian sebesar 80.52**%.**

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk sasaran peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian IKU IKM Kapanewon adalah 93.67. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra adalah 104.07%**.** Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kecamatan	90	89.22	90	93.67	104.07	90	104.07

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90, realisasi sebesar 93.67 tercapai 104.07% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 89.22 dengan target 90 atau tercapai sebesar 99.13%. Target IKM tahun 2020 sebesar 90 tercapai sebesar 104.07% artinya mengalami kenaikan sebesar 4.94%.

Pada semester I tahun 2020 Kapanewon Piyungan menyebar 350 lembar kuesioner kepada 350 responden yang merupakan tamu yang meminta pelayanan

di Kapanewon Piyungan. Sedangkan pada semester II tahun 2020 Kapanewon Piyungan menyebar 350 lembar quisioner kepada responden. Sehingga hasil IKM tahun 2020 berasal dari 700 quisioner yang telah diisi oleh tamu pelayanan di Kapanewon Piyungan.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 99.13% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan.

Beberapa permasalahan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain :

1. Masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan.
2. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan.
3. Kebijakan pemerintah pusat berubah ubah dan informasi yang sampai di kapanewon sering terlambat.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Kapanewon Piyungan melakukan hal-hal :

1. Kapanewon Piyungan senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu baik itu melalui kalurahan maupun langsung kepada warga masyarakat yang meminta layanan untuk kemudian disosialisasikan kepada saudara/teman terdekat. Selain itu, sosialisasi secara online baik itu *Face book, Instagram* maupun *web site* kapanewon atau grup *Whatsapp* juga sangat membantu dalam penyebarluasan informasi pelayanan masyarakat di kapanewon..
2. Rutin dan rajin *update* informasi khususnya dalam hal kependudukan.
3. Dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan, Kapanewon Piyungan senantiasa berusaha meningkatkan komitmen untuk

terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membangun jejaring informasi masyarakat melalui media sosial.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Program ini didukung dengan satu kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Capaian Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2020 menargetkan sebesar 89 tercapai sebesar 93.67 atau 105.2%. Capaian program tahun 2019 sebesar 89.22 dengan target 90 atau tercapai sebesar 99.13%. apabila dibandingkan dengan capaian program tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4.94%.

Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen.

Gambar 3. Pelayanan Kapanewon Piyungan

2. Sasaran Peningkatan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

Untuk sasaran peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2020

adalah 76.44%. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu sedangkan yang terendah ada pada IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.

Untuk capaian sasaran peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah tahun 2019 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23.56 %.

Tabel III.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	90	100	111,11	90	111.11
3.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	18.2	18.2	100	18.2

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang **sangat tinggi**. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100 realisasi sebesar 100 atau 100% yang bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBKal) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100%. Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 3 Kalurahan dibagi dengan semua kalurahan dikali 100%.

Dari 3 kalurahan di Kapanewon Piyungan, seluruhnya sudah menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 tepat waktu sesuai dengan rencana.

Faktor penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM kalurahan yang masih terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kapanewon.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90% realisasi sebesar 100%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 111.11% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 111.11%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 111.11% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah Desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai, yaitu 3 (tiga) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 3 (tiga) desa kali seratus persen. Capaian indikator

tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua kalurahan sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kapanewon.

Gambar 4. Koordinasi dan Pendampingan secara virtual

c. Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang tidak maksimal. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100%, realisasi sebesar 18.2 % atau bernilai kinerja **Sangat Rendah**. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 18.2% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah Program Prioritas Musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan program dikalikan seratus persen.

Faktor yang perlu diperhatikan pada IKU ini adalah bahwa program/kegiatan pembangunan usulan dari kalurahan terlebih dahulu diverifikasi oleh kapanewon,

diteliti apakah usulan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari Kabupaten Bantul atau belum. Apabila belum, maka usulan bisa dikembalikan ke kalurahan untuk direvisi tapi apabila usulan tersebut sudah sesuai, maka kemungkinan besar usulan tersebut akan diakomodir pada musrenbang kecamatan .

Pada tahun 2020 realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan sangat rendah/tidak tercapai (18.2%) karena adanya refocusing anggaran pada OPD yang seharusnya mengakomodir usulan musrenbang Kapanewon Piyungan.

Pada awal tahun anggaran memang capaian indikator ini mencapai 100% usulan yang diakomodir. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ada refocusing anggaran di Kabupaten Bantul sehingga capaian usulan musrenbang yang diakomodir oleh OPD menurun drastis menjadi hanya 2 usulan yang dilaksanakan dari 11 usulan yang diakomodir atau hanya sekitar 18.2%. Refocusing ini dilaksanakan pada awal triwulan II tahun 2020. Refocusing dilaksanakan pada hampir semua anggaran OPD se Kabupaten Bantul. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan covid 19 di Kabupaten Bantul.

Gambar 5. Musrenbang Kecamatan Piyungan tahun 2020

Capaian sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah di dukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum pada tahun 2020 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

1) Peningkatan Wawasan Kebangsaan
2) Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
3) Pendampingan Tata kelola Pemerintahan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, target pada tahun 2020 sebesar 95% terealisasi sebesar 95% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

c. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

Capaian program ini ukur dengan indikator cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan. Target pada tahun 2020 sebesar 95% terealisasi sebesar 95% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan :

1) Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan
2) Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kapanewon

Selain program pendukung sasaran sebagaimana di atas, terdapat 3 (tiga) program pendukung yang di ampu oleh Sekretariat Kapanewon yang terkait dengan operasional Kapanewon Piyungan. Program ini bersifat supporting kepada tugas pokok fungsi Kapanewon Piyungan karena pada dasarnya tugas pokok fungsi kapanewon adalah fasilitasi kegiatan pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Fasilitasi ini berupa rapat koordinasi dan konsultasi. Adapun program tersebut adalah;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2020 mentargetkan 79 terealisasi sebesar 80.32 dengan capaian sebesar 101.67%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Piyungan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Dibanding pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Kapanewon Piyungan sebesar 75.69, dengan demikian pada tahun ini ada kenaikan sebesar 4.63 Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentarget kan nilai sebesar 80 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 100.4 %. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mentargetkan 95% terealisasi sebesar 95% dengan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 95%. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2020 dilaksanakan semesteran dan tahunan. Evaluasi Kinerja merupakan penerapan system manajemen birokrasi pada semua level dan lini perangkat organisasi perangkat daerah.

Capaian program ini ukur dengan indikator Capaian Nilai Evaluasi Kinerja pada tahun 2020 mentargetkan 81 terealisasi sebesar 89.43 dengan capaian sebesar 110.4%. Capaian indikator ini di peroleh dari Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Kinerja Kapanewon Piyungan triwulan IV tahun 2019, karena selama tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian evaluasi kinerja. Program ini di dukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu ;

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan masih sama dengan tahun sebelumnya (2019). Hal ini sesuai Peraturan Bupati nomor no 107 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul tahun 2016 - 2021 akan tetapi kegiatan yang dilaksanakan berbeda. Sehingga apabila dibandingkan dapat dilihat pada program yang dilaksanakan.

Realiasasi anggaan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.53% dari pada realisasi anggaran tahun 2019. Pada tahun 2019 dengan anggaran Rp. 868.720.000,00 dapat terserap sebesar Rp. 859.993.302,00 atau sebesar 99 % sedangkan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 680.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 676.786.134,00 atau 99.53 %.

Perbandingan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 5
Perbandingan Program/Kegiatan tahun 2019 -2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran 2019			Anggaran 2020			% Kenaikan (penurunan)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**301.845.000**	**293.118.502**	**97,11**	**285.790.400**	**283.972.034**	**99,36**	**2,25**
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	184.070.000	175.343.502	95,26	181.982.000	180.163.634	99,00	3,74
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	117.775.000	117.775.000	100,00	103.808.400	103.808.400	100,00	0,00
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**160.450.000**	**160.449.800**	**100,00**	**151.276.600**	**149.881.100**	**99,08**	**-0,92**
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	48.750.000	48.750.000	100,00	31.500.000	31.500.000	100,00	0,00
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kamtor	15.000.000	15.000.000	100,00	8.756.600	8.756.600	100,00	0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	88.700.000	88.699.800	100,00	101.020.000	99.624.500	98,62	-1,38
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	8.000.000	8.000.000	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**5.250.000**	**5.250.000**	**100,00**	**6.445.000**	**6.445.000**	**100,00**	**0,00**

	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	5.250.000	5.250.000	100,00	6.445.000	6.445.000	100,00	
IV	**Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat**	**12.000.000**	**12.000.000**	**100,00**	**12.020.000**	**12.020.000**	**100,00**	**0,00**
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat				12.020.000	12.020.000	100,00	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12.000.000	12.000.000	100,00				
V	**Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**200.780.000**	**200.780.000**	**100,00**	**81.820.000**	**81.820.000**	**100,00**	**0,00**
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	5.250.000	5.250.000	100,00				
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	17.550.000	17.550.000	100,00				
	Pengendalian keamanan lingkungan	16.925.000	16.925.000	100,00				
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	6.300.000	6.300.000	100,00				
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	90.125.000	90.125.000	100,00				
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	18.605.000	18.605.000	100,00				
	Rapat koordinasi unsur Muspika	25.075.000	25.075.000	100,00				
	Pelaksanaan Rakorpem desa	5.250.000	5.250.000	100,00				
	Musrenbang tingkat kecamatan	15.700.000	15.700.000	100,00				

	Peningkatan Wawasan Kebangsaan				31.030.000	31.030.000	100,00	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana				26.240.000	26.240.000	100,00	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				24.550.000	24.550.000	100,00	
VI	**Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**130.370.000**	**130.370.000**	**100,00**	**99.289.000**	**99.289.000**	**100,00**	**0,00**
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	48.070.000	48.070.000	100,00				
	Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah	21.750.000	21.750.000	100,00				
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	50.050.000	50.050.000	100,00				
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	10.500.000	10.500.000	100,00				
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan				81.889.000	81.889.000	100,00	
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan				17.400.000	17.400.000	100,00	
VII	**Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**58.025.000**	**58.025.000**	**100,00**	**43.359.000**	**43.359.000**	**100,00**	**0,00**
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	21.475.000	21.475.000	100,00				
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	8.050.000	8.050.000	100,00				
	Pembinaan Organisasi Perempuan	16.800.000	16.800.000	100,00				

	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	11.700.000	11.700.000	100,00				
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				24.810.000	24.810.000	100,00	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan				18.549.000	18.549.000	100,00	
	J U M L A H	**868.720.000**	**859.993.302**	**99,00**	**680.000.000**	**676.786.134**	**99,53**	**0,53**

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kapanewon Piyungan sebesar Rp. 680.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 676.786.134,00, atau sebesar 99.53%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	12.020.000	1.77
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	224.468.000	33.01
	Jumlah	**236.488.000**	**34.78**
Belanja Langsung Pendukung		443.512.000	65.22
Total Belanja Langsung		**680.000.000**	**100,00**

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang mendukung dua sasaran strategis utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 236.488.000,00 atau sebesar 34.78% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 443.512.000,00 atau sebesar 65.22 % dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas

Perencanaan Pembangunan Wilayah dengan besaran anggaran 33.01 % dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang lebih kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar 1.77 % dari total anggaran belanja langsung.

Dari tabel III.5 diatas menunjukan anggran untuk belanja rutin/belanja pendukung masih lebih besar dikarenakan saat pandemi covid 19 ada refocusing kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid 19. Dengan demikian banyak anggraan kegiatan yang dikurangi sehingga pagu kegiatan berkurang. Anggaran awal tahun 2020 sebesar Rp. 896.273.000,00 Direfocusing untuk penanganan covid 19 menjadi Rp. 680.000.000,00

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 99,53% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** (dengan anggaran yang tersedia, diperoleh realisasi/target yang maksimal) jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 34,77 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 64,76%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada semua program/kegiatan di IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBKal tepat waktu, Rata-rata Persentase Kesesuaian APBKal dengan RPJMDes, Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan dan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat menyerap anggaran masing-masing 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	93.67	104,07	12.020.000	12.020.000	100
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	24.550.000	24.550.000	100
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111.11	57.270.000	57.270.000	100
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	18.2	18.2	142.648.000	142.648.000	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 0,47 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran pada belanja langsung pendukung.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,47 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, maka pada semua IKU tidak ada efisiensi anggaran baik itu IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), IKU Persentase Kalurahan dengan Penyelesaian APBKal Tepat Waktu, IKU Rata-rata Persentase Kesesuaian APBKal dengan RPJMDes, dan IKU Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan, yaitu sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada

Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah efisiensi anggarannya kecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 8

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	12.020.000	12.020.000	0	0
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	24.550.000	24.550.000	0	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	57.270.000	57.270.000	0	0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	142.648.000	142.648.000	0	0
Jumlah		**236.488.000**	**236.488.000**	**0**	**0**
Belanja Langsung Pendukung		443.512.000	440.298.134	3.213.866	0.72
Total Belanja langsung		**680.000.000**	**676.786.134**	**3.213.866**	**0.47**

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target. Rata-rata capaian IKU selurhnya sebesar 76,02 % dengan kriteria kinerja **Tinggi.**

Meskipun Kapanewon Piyungan berkinerja tinggi, akan tetapi dalam dalam menjalankan tugas pokoknya ditemuai beberapa permasalahan diantaranya :

- Masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan.
- Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan.
- Kebijakan pemerintah pusat berubah ubah dan informasi yang sampai di kapanewon sering terlambat.
- SDM pamong kalurahan yang masih terbatas

Sedangkan untuk kedepannya perlu solusi untuk permasalahan dimaksud, diantaranya :

- Kapanewon Piyungan senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu baik itu melalui kalurahan maupun langsung kepada warga masyarakat yang meminta layanan untuk kemudian disosialisasikan kepada saudara/teman terdekat. Selain itu, sosialisasi secara online baik itu *Face book, Instagram* maupun *web site* kapanewon atau grup *Whatsapp* juga sangat membantu dalam penyebarluasan informasi pelayanan masyarakat di kapanewon.
- Rutin dan rajin *update* informasi khususnya dalam hal kependudukan.
- Dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan, Kapanewon Piyungan senantiasa berusaha meningkatkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membangun jejaring informasi masyarakat melalui media sosial.
- Melakukan pendampingan kepada pemerintahan kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam renstra Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk tahun anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.